



## STRATEGI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL DI INDONESIA

Nisa Lestari<sup>1</sup>; Nabil Alam<sup>2</sup>; Ade Yusfiani Ginova<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

<sup>3</sup>Informatika, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

<sup>1</sup>Correspondence Email: [nisalestari2106@gmail.com](mailto:nisalestari2106@gmail.com)

Received: 13 April 2024

Accepted: 20 Juni 2024

Published: 25 Juni 2024

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan strategi kebijakan publik yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia secara simultan, terintegrasi, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR), studi ini menganalisis berbagai hasil penelitian yang relevan dari database Dimensions dan Scopus dalam rentang waktu 2020–2025. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah bereputasi yang membahas secara eksplisit strategi kebijakan publik terkait isu kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih bersifat parsial, belum terintegrasi secara lintas sektor dan wilayah, serta kurang responsif terhadap pendekatan multidimensional kemiskinan. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial adaptif, pemanfaatan data longitudinal, dan pembelajaran dari praktik internasional khususnya revitalisasi pedesaan di Tiongkok untuk mendukung transformasi intervensi sosial di tingkat lokal. Rekomendasi strategis yang diusulkan mencakup penguatan implementasi Undang-Undang Desa, reformasi agraria yang inklusif, serta integrasi prinsip SDGs dalam kebijakan nasional. Penelitian ini berkontribusi dalam menutup gap konseptual dan praktis mengenai efektivitas kebijakan sosial berbasis bukti dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan struktural di Indonesia.

**Keywords:** Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Sosial, Kebijakan Publik.

## A. Pendahuluan

Secara umum, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang tetap relevan untuk dikaji secara berkelanjutan. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kemiskinan telah berlangsung sejak lama dan masih menjadi bagian dari realitas masyarakat, tetapi juga karena gejalanya semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia(Fardi & Pratama, 2023). Salah satu faktor penyebab kemiskinan yang jarang mendapat perhatian adalah bencana atau wabah penyakit. Pandemi Covid-19, telah membawa dampak signifikan. Dampak tersebut mencakup meningkatnya angka pengangguran, turunnya produktivitas baik pada tingkat individu maupun perusahaan, serta munculnya kelompok masyarakat miskin baru yang secara keseluruhan menambah jumlah penduduk miskin (I. N. Pratama, 2023b). Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, faktor alam dan ekonomi seperti terjadinya bencana alam, keterbatasan sumber daya, serta ketidakstabilan ekonomi dapat berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan(I. N. Pratama, 2023).

Kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan dua fenomena yang saling terkait dan berdampak luas terhadap pembangunan manusia. Kemiskinan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai kondisi multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, serta partisipasi sosial dan politik (Hababil et al., 2024). Sementara itu, ketimpangan sosial merujuk pada distribusi yang tidak setara atas sumber daya, peluang, dan hasil pembangunan, baik antarindividu maupun antarwilayah. Dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, pengukuran dan pemahaman yang komprehensif terhadap kedua variabel ini menjadi landasan penting bagi penyusunan strategi kebijakan publik yang efektif dan kontekstual (Deni, 2023).

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis negara untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya secara adil, sekaligus menanggulangi ketimpangan struktural yang melahirkan kemiskinan. Perlindungan sosial, sebagai bagian dari kebijakan publik, berfungsi untuk

menjamin hak-hak dasar warga negara melalui mekanisme jaminan sosial, bantuan sosial, dan subsidi yang menyasar kelompok rentan (Kenney et al., 2022). Dalam kerangka ini, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh desain intervensi, kapasitas implementasi, ketersediaan data, serta sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, strategi kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial harus bersifat fleksibel, berbasis bukti, dan responsif terhadap dinamika lokal dan global (Riyanto, 2025).

Evaluasi terhadap strategi kebijakan publik menunjukkan adanya dinamika kompleks antara keberhasilan dan kegagalan implementasi. Tantangan terbesar seringkali muncul pada tahap pelaksanaan, terutama karena keterbatasan sumber daya, tingginya angka pergantian tenaga kerja, serta kurangnya pelatihan bagi pelaksana kebijakan (Kenney et al., 2022). Di samping itu, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain yang matang dan keterlibatan pemangku kepentingan yang luas (Selepe, 2023). Namun, penggunaan bukti ilmiah untuk menilai efektivitas kebijakan masih menghadapi hambatan, mengingat adanya temuan yang saling bertentangan. Contohnya adalah kebijakan *minimum unit pricing* (MUP) di Skotlandia dan Australia, yang menunjukkan hasil evaluasi yang bervariasi, mengindikasikan pentingnya pendekatan berbasis konteks dalam menafsirkan efektivitas kebijakan (Robinson et al., 2023); (Rayanakorn et al., 2022).

Keterbatasan pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada aspek pendapatan telah mendorong berkembangnya pendekatan multidimensional. Pendekatan ini menekankan pentingnya indikator non-moneter seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sebagai dimensi integral dari kemiskinan (Zulkifli & Abidin, 2023). Namun, pendekatan ini juga menghadapi tantangan metodologis, seperti pemilihan indikator yang relevan dan keterbatasan sistem pembobotan yang digunakan dalam Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI), yang dinilai belum mencerminkan pengalaman subjektif masyarakat miskin secara akurat (Macció & Mitchell, 2023); (de Silva & Premaratna, 2023). Untuk itu, dibutuhkan pengumpulan data yang lebih akurat, representatif, dan kontekstual. Selain itu, intervensi kebijakan perlu diarahkan kepada kelompok dan wilayah yang sering kali luput dari indikator konvensional, seperti kawasan permukiman informal

dan kelompok pengungsi (Lyons & Kass-Hanna, 2021); (Opaluwa et al., 2022).

Pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kemiskinan global, dengan proyeksi penambahan hingga 100 juta orang ke dalam kategori miskin ekstrem (Valensi, 2020). Negara-negara berkembang mengalami kerugian pendapatan lebih dari 220 miliar dolar AS, yang sebagian besar dialami oleh kelompok yang tidak memiliki perlindungan sosial memadai (Saunders & Evans, 2020). Di India, diperkirakan 150–199 juta penduduk jatuh ke dalam jurang kemiskinan akibat disrupsi ekonomi, terutama di wilayah pedesaan (Ram & Yadav, 2021). Dalam konteks ini, berbagai strategi intervensi telah dilakukan, antara lain penguatan jaminan sosial, jaminan ketahanan pangan, serta bantuan langsung untuk menopang kehidupan masyarakat miskin selama masa lockdown (Pereira & Oliveira, 2020); (Buheji et al., 2020). Pandemi ini menegaskan perlunya transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan.

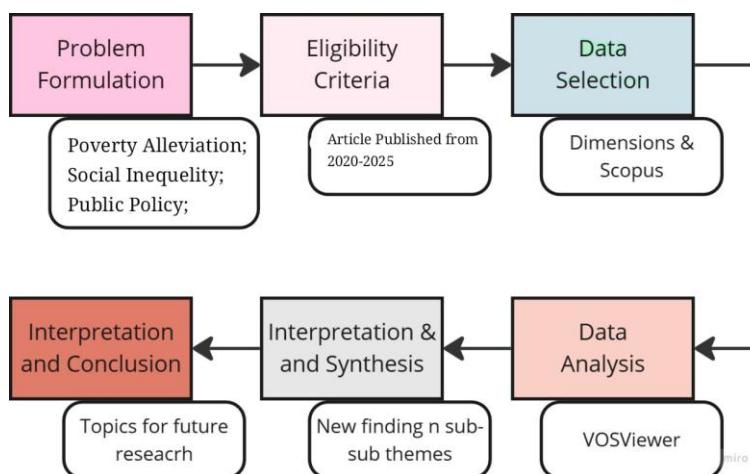
Berdasarkan tinjauan literatur dan temuan empiris sebelumnya, tampak bahwa masih terdapat *research gap* dalam hal integrasi antar kebijakan publik yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan responsif terhadap pendekatan multidimensional kemiskinan. Banyak strategi masih bersifat parsial, tidak berkelanjutan, dan belum sepenuhnya berbasis data lokal yang akurat. Selain itu, belum banyak kajian yang mengkaji bagaimana praktik internasional dan kerangka SDGs dapat diadaptasi secara kontekstual ke dalam sistem kebijakan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merumuskan Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia secara simultan, terintegrasi, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus

(<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 6 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Prosedur penelitian

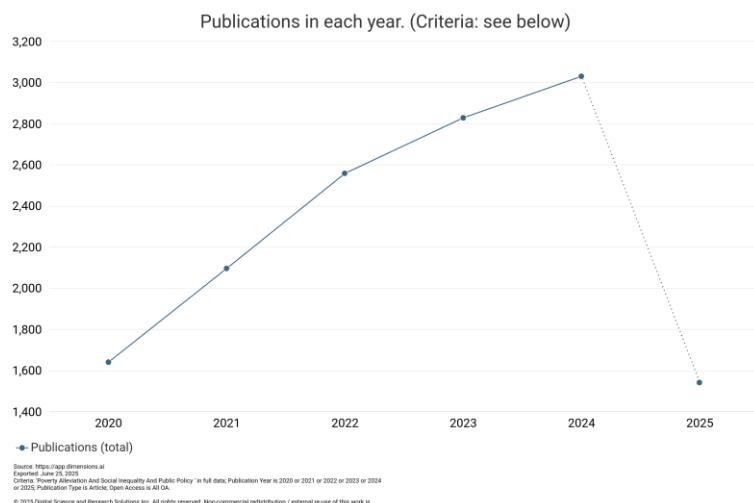
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "(Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial dan Kebijakan Publik) OR (Poverty Alleviation AND Social Inequality AND Public Policy)". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk

membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Strategi Kebijakan Publik dalam Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 140,222 data, meliputi data *open access* sebanyak 34,587 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 34,587 data tersebut, terdapat 23,422 data merupakan artikel dan 11,161 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 13,693 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



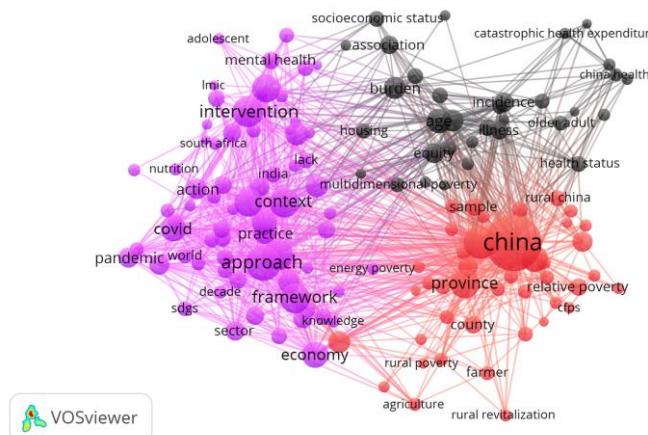
Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah publikasi dengan topik "Poverty Alleviation and Social Inequality and Public Policy" dari tahun 2020 hingga 2025. Terlihat bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan konsisten dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024. Pada tahun 2020, jumlah publikasi tercatat sekitar 1.650, kemudian meningkat signifikan setiap tahunnya: sekitar 2.100 pada 2021, sekitar 2.550 pada 2022, hingga mendekati 2.850 pada 2023, dan akhirnya mencapai puncak sekitar 3.050 publikasi pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan peningkatan perhatian akademik terhadap isu-isu pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kebijakan publik selama lima tahun pertama. Namun, pada tahun

2025 terlihat penurunan yang sangat tajam, dengan jumlah publikasi hanya sekitar 1.550, bahkan lebih rendah dari tahun 2020. Penurunan ini tampaknya disebabkan oleh belum lengkapnya data publikasi untuk tahun 2025, mengingat data diekspor pada pertengahan tahun (Juni 2025), sehingga banyak publikasi yang mungkin belum tercatat atau belum dipublikasikan secara resmi. Oleh karena itu, data tahun 2025 sebaiknya diperlakukan sebagai data sementara dan tidak digunakan untuk perbandingan tren tahunan yang final.

## 2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3



**Gambar 3.** Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variable yang diteliti selama 6 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi dari setiap variabel adalah sebagai berikut :

- a. purple Cluster (Pendekatan Intervensi dan Konteks Global)

Klaster ini berfokus pada *intervention*, *context*, *approach*, *framework*, *pandemic*, *mental health*, *covid*, *action*, *sdgs*, *nutrition*, *practice*, *sector*, *south africa*, *india*, and *world*. Klaster ini merepresentasikan pendekatan konseptual dan praktik intervensi sosial dalam konteks global, terutama berkaitan dengan tantangan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Isu kesehatan mental dan nutrisi pada kelompok rentan (seperti adolescent) menjadi perhatian utama,

disertai penekanan pada pendekatan lintas sektor dan kerangka kerja multidisipliner. Negara-negara berkembang seperti India dan Afrika Selatan tampil sebagai locus empiris penting dalam literatur.

b. black Cluster (Determinasi Sosial dan Dimensi Multidimensional Kemiskinan)

Dalam klaster berfokus pada kata seperti *age, burden, equity, multidimensional poverty, socioeconomic status, illness, incidence, association, catastrophic health expenditure, older adult, housing, and health status*. Klaster ini memetakan keterkaitan antara dimensi kemiskinan dan indikator determinan sosial, seperti usia, status sosial ekonomi, dan kesehatan. Terdapat fokus signifikan pada konsep kemiskinan multidimensi dan beban pengeluaran kesehatan yang bersifat katastropik, khususnya pada kelompok usia lanjut. Ketimpangan dalam akses terhadap perumahan dan layanan kesehatan juga menjadi variabel penting yang dianalisis melalui pendekatan asosiatif dan regresif.

c. Orange Cluster (Fokus Geografis dan Spasial pada Kemiskinan di Cina)

Klaster ini mendominasi pada *china, province, county, rural china, relative poverty, cfps, rural revitalization, farmer, agriculture, and economy*. Klaster ini menyoroti studi-studi yang berfokus pada konteks regional di Tiongkok, khususnya mengenai strategi pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan. Program revitalisasi pedesaan (rural revitalization) dan transformasi pertanian menjadi kata kunci utama yang didukung oleh data mikro seperti CFPS (China Family Panel Studies). Diskursus ini juga memuat perhatian terhadap dinamika antar provinsi/kabupaten, serta pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kondisi petani dan kemiskinan relatif.

Berdasarkan pembagian klaster tersebut, para peneliti dapat melakukan studi yang lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut.

a. **Transformasi Pendekatan Intervensi Sosial di Indonesia: Dari Pandemi ke Agenda Pembangunan Berkelanjutan**

Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya evaluasi ulang terhadap kebijakan sosial yang diarahkan untuk intervensi kemiskinan, dengan menyoroti pentingnya strategi yang adaptif dalam menghadapi kerentanan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, integrasi mekanisme perlindungan sosial menjadi krusial, terutama melalui implementasi skema seperti *Temporary Basic Income* (TBI) yang berpotensi meringankan beban ekonomi kelompok miskin dan hampir miskin dengan biaya relatif rendah, yaitu sekitar 0,27% hingga 0,63% dari PDB negara-negara berkembang (Barron et al., 2022). Lebih lanjut, pandemi memperjelas urgensi cakupan jaminan kesehatan universal dan sistem perlindungan sosial yang kuat untuk

menanggulangi ketimpangan akses layanan kesehatan serta mendukung kelompok rentan, termasuk mereka yang mengalami diskriminasi sistemik (Gray Molina et al., 2022); (Tan et al., 2023).

Di sisi lain, integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam strategi penanggulangan kemiskinan semakin menekankan perlunya pendekatan multidimensional, yang mencakup aspek pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Praktik di negara seperti Tiongkok menunjukkan efektivitas penggunaan indikator multidimensi berbasis data dalam mengarahkan alokasi dana secara lebih terfokus pada kebutuhan lokal (Yang et al., 2022). Pemerintah daerah menjadi aktor penting dalam mengimplementasikan strategi berbasis SDGs dengan mengoptimalkan sumber daya regional serta memperkuat partisipasi komunitas, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, pendekatan ini memperkuat komitmen global terhadap hak ekonomi-sosial dan prinsip keberlanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Agenda 2030, sekaligus mendorong tata kelola yang lebih akuntabel (M. Y. J. Pratama & Zubaidah, 2024); (Padmakanthi, 2023).

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa transformasi pendekatan intervensi sosial di Indonesia perlu diarahkan pada penguatan perlindungan sosial yang bersifat fleksibel dan inklusif, dengan memperhatikan dimensi non-moneter dari kemiskinan. Pandemi telah membuktikan bahwa kebijakan yang menggabungkan intervensi kesehatan masyarakat dan jaminan sosial dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Untuk itu, Indonesia perlu mempercepat integrasi prinsip-prinsip SDGs ke dalam kebijakan nasional secara lintas sektor dan berbasis wilayah. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks pemulihan pasca-pandemi, tetapi juga esensial untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial di jangka panjang.

### **b. Ketimpangan Struktural dan Determinan Sosial Kemiskinan di Indonesia.**

Determinasi sosial seperti usia, status sosial ekonomi (SES), dan beban pengeluaran rumah tangga memegang peranan sentral dalam menjelaskan ketimpangan kesehatan, terutama di kalangan populasi rentan. Kelompok lansia, misalnya, memiliki kebutuhan kesehatan yang lebih tinggi, yang berdampak langsung pada peningkatan pengeluaran rumah tangga. Di Vietnam, sebesar 86,3% pengeluaran kesehatan rumah tangga berasal dari biaya langsung (OOPHE) untuk lansia, dengan 12,2% dari mereka mengalami tekanan finansial akibat beban tersebut (Giang et al., 2022). Status sosial ekonomi yang rendah juga berkorelasi kuat dengan hasil kesehatan yang buruk dan tingkat toksisitas finansial yang tinggi, di mana individu dalam

kuartil SES terendah mengalami prevalensi toksisitas finansial hingga 68%, jauh lebih tinggi dibandingkan 15% pada kelompok SES tertinggi (Valero-Elizondo et al., 2022). Faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi, pendidikan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal membentuk landasan utama bagi disparitas kesehatan, menciptakan akumulasi kerentanan yang saling berkelindan.

Di sisi lain, pemahaman terhadap kemiskinan secara multidimensional memberikan perspektif yang lebih holistik dalam merancang intervensi kebijakan yang efektif. Kemiskinan multidimensional tidak hanya diukur melalui indikator pendapatan, tetapi juga melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (Zulkifli & Abidin, 2023). Alat ukur seperti *Multidimensional Poverty Index* (MPI) dan metode Alkire-Foster memungkinkan pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pengukuran deprivasi yang lebih spesifik (De Rosa, 2022); (Saddique et al., 2023). Studi kasus di Afrika Selatan dan Pakistan menunjukkan bahwa disparitas regional dapat dikenali melalui indikator spesifik seperti akses terhadap sanitasi, kepemilikan aset transportasi, dan layanan publik (Jackson & Yu, 2023). Selain itu, faktor demografis seperti jenis kelamin, usia, dan status pekerjaan juga terbukti memengaruhi tingkat kemiskinan multidimensional secara signifikan, menandakan perlunya kebijakan yang sensitif terhadap keragaman populasi (Saddique et al., 2023).

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa ketimpangan struktural dan determinan sosial kemiskinan di Indonesia tidak dapat ditangani hanya dengan pendekatan monodimensional berbasis pendapatan. Kompleksitas faktor usia, status sosial ekonomi, dan beban pengeluaran kesehatan harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang saling mempengaruhi dan memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan kebijakan berbasis indikator multidimensional yang mampu menjangkau akar penyebab kemiskinan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kondisi hunian. Pendekatan ini memungkinkan perumusan intervensi yang lebih adaptif terhadap variasi regional dan karakteristik demografis, sekaligus memperkuat fondasi kebijakan inklusif yang berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial secara struktural.

### c. Pembelajaran Global untuk Strategi Nasional: Refleksi dari Kasus Tiongkok dan Adaptasinya di Indonesia

Revitalisasi pedesaan dan reformasi pertanian menjadi strategi krusial dalam merespons ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Transformasi sektor pertanian yang ditandai dengan pergeseran ke sektor non-pertanian telah memperkuat kemiskinan pedesaan secara persisten di berbagai

provinsi (Abduh, 2023). Dalam konteks ini, penguatan kinerja usaha tani terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadi elemen penting dalam pengentasan kemiskinan (Boni, 2022). Namun, ketimpangan kepemilikan lahan tetap menjadi hambatan struktural yang melahirkan konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (Earlene & Djaja, 2023). Reformasi agraria yang efektif diperlukan untuk menciptakan redistribusi lahan yang adil sebagai landasan keadilan sosial. Di sisi lain, keberadaan Undang-Undang Desa telah memperkuat peran pemerintahan desa dalam pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan kapasitas kelembagaan dan tekanan pasar global (Sujito & Ghofur, 2023). Fragmentasi gerakan agraria serta kecenderungan kooptasi oleh elit politik juga menjadi tantangan dalam mewujudkan agenda revitalisasi yang transformatif(White et al., 2023).

Dalam mendukung kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, pendekatan berbasis data longitudinal dan mikroanalisis menjadi sangat esensial. Data longitudinal memungkinkan pemantauan perubahan indikator sosial seperti partisipasi pendidikan dan status kesehatan dalam jangka waktu tertentu, sekaligus meningkatkan akurasi evaluasi kebijakan (Ramberg & Watkins, 2020); (Pattaro et al., 2020). Studi longitudinal juga mengungkap dampak kebijakan investasi sosial terhadap dinamika keluarga dan fertilitas, yang sangat penting bagi perencanaan jangka panjang (Billingsley et al., 2022). Sementara itu, mikroanalisis memberikan wawasan granular tentang mekanisme implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap individu dan komunitas lokal (Capano & Toth, 2023). Melalui analisis data mikro, kebijakan dapat ditargetkan lebih efektif kepada kelompok yang paling membutuhkan, sehingga meningkatkan keberpihakan dan efisiensi strategi pembangunan (Hoff et al., 2022).

Interpretasi dari temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran dari praktik global, khususnya Tiongkok, dapat memberikan inspirasi signifikan dalam perumusan strategi nasional Indonesia, terutama dalam revitalisasi pedesaan dan pembangunan berbasis data. Keberhasilan Tiongkok dalam mengintegrasikan kebijakan agraria, pembangunan pedesaan, dan basis data longitudinal seperti CFPS menjadi contoh penting bahwa keberhasilan intervensi bergantung pada konsistensi tata kelola dan keakuratan data. Dalam konteks Indonesia, penguatan basis data seperti PODES, Susenas, dan Sakernas serta pemberdayaan kelembagaan desa merupakan kunci dalam mendorong desain kebijakan yang inklusif, adaptif, dan kontekstual. Adaptasi ini menuntut sinergi lintas sektor antara reformasi agraria, pembangunan kapasitas desa, dan sistem informasi yang solid agar agenda pengurangan ketimpangan sosial dan kemiskinan pedesaan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

## D. Kesimpulan

Transformasi pendekatan intervensi sosial di Indonesia menuntut integrasi yang komprehensif antara perlindungan sosial yang adaptif, pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan, serta pemanfaatan data longitudinal dan praktik pembangunan berbasis komunitas. Temuan-temuan mutakhir menunjukkan bahwa respons yang efektif terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial harus melampaui pendekatan moneter semata, dan sebaliknya mengedepankan intervensi yang mempertimbangkan determinan sosial seperti usia, status sosial ekonomi, beban pengeluaran, serta ketimpangan spasial. Selain itu, pembelajaran dari praktik global, seperti model revitalisasi pedesaan di Tiongkok, menegaskan pentingnya tata kelola yang kuat dan berbasis bukti dalam menyusun strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi prinsip SDGs, reformasi agraria, dan penguatan kapasitas lokal perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda kebijakan publik di Indonesia. Agenda Riset yang mendesak untuk dilakukan adalah kajian longitudinal berbasis wilayah terhadap efektivitas program perlindungan sosial pasca-pandemi dalam menurunkan kemiskinan multidimensi, serta riset evaluatif terhadap implementasi Undang-Undang Desa dalam mendukung revitalisasi pertanian dan distribusi aset agraria secara adil. Kedua riset ini krusial untuk memastikan bahwa kebijakan sosial yang diambil benar-benar menjangkau kelompok paling rentan dan memperkecil jurang ketimpangan struktural di tingkat lokal.

## Bibliography

- Abduh, M. (2023). Indonesia Agricultural Transformation: How Far? Where Would It Go? In *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.36574/jpp.v7i1.366>
- Barron, G. C., Laryea-Adjei, G., Vike-Freiberga, V., Abubakar, I., Dakkak, H., Devakumar, D., Johnsson, A., Karabey, S., Labonté, R., Legido-Quigley, H., Lloyd-Sherlock, P., Olufadewa, I. I., Ray, H. C., Redlener, I., Redlener, K., Serageldin, I., Lima, N. T., Viana, V., Zappone, K., ... Karadag, O. (2022). Safeguarding people living in vulnerable conditions in the COVID-19 era

- through universal health coverage and social protection. *The Lancet Public Health*, 7(1), e86–e92. [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(21\)00235-8](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00235-8)
- Billingsley, S., Neyer, G., & Wesolowski, K. (2022). Social Investment Policies and Childbearing Across 20 Countries: Longitudinal and Micro-Level Analyses. *European Journal of Population*, 38(5), 951–974. <https://doi.org/10.1007/s10680-022-09626-3>
- Boni, Y. (2022). Agricultural Development's Influence on Rural Poverty Alleviation in the North Buton Regency, Indonesia—The Mediating Role of Farmer Performance. *Economies*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/economies10100240>
- Buheji, M., da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavrić, B., Leandro do Carmo de Souza, Y., Souza da Costa Silva, S., Hanafi, M., & Chetia Yein, T. (2020). The Extent of COVID-19 Pandemic Socio-Economic Impact on Global Poverty. A Global Integrative Multidisciplinary Review. *American Journal of Economics*, 10(4), 213–224. <https://doi.org/10.5923/j.economics.20201004.02>
- Capano, G., & Toth, F. (2023). Health policy under the microscope: a micro policy design perspective. *Frontiers in Public Health*, 11(June), 1–10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1180836>
- De Rosa, D. (2022). Are Italians Getting Multidimensionally Poorer? Evidence on the Lack of Equitable and Sustainable Well-Being. *Italian Economic Journal*, 8(1), 145–174. <https://doi.org/10.1007/s40797-021-00159-y>
- de Silva, H. V. S., & Premaratna, S. P. (2023). An approach to determine multidimensional poverty index for Sri Lanka: a comparative study. *Sri Lankan Journal of Banking and Finance*, 6(1).
- Deni, A. (2023). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Evaluasi, dan Analisis)*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 150–155.
- Giang, N. H., Vinh, N. T., Phuong, H. T., Thang, N. T., & Oanh, T. T. M. (2022). Household financial burden associated with healthcare for older people in Viet Nam: a cross-sectional survey. *Health Research Policy and Systems*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00913-3>
- Gray Molina, G., Montoya-Aguirre, M., & Ortiz-Juarez, E. (2022). Temporary Basic Income in Times of Pandemic: Rationale, Costs and Poverty-Mitigation Potential. *Basic Income Studies*, 17(2), 125–154.

- <https://doi.org/10.1515/bis-2020-0029>
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis Pengaruh Pemerataan Ekonomi Dalam Upaya Menghapus Ketimpangan Sosial-Ekonomi Antar Masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Hoff, R., Maltzahn, N., Hasting, R. L., Merkus, S. L., Undem, K., Kristensen, P., Mehlum, I. S., & Gran, J. M. (2022). An initiative for a more inclusive working life and its effect on return-to-work after sickness absence: a multistate longitudinal cohort study. *BMJ Open*, 12(11), 1–10. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062558>
- Jackson, S., & Yu, D. (2023). Re-examining the multidimensional poverty index of South Africa. *Social Indicators Research*, 166(1), 1–25.
- Kenney, E. L., Mozaffarian, R. S., Ji, W., Tucker, K., Poole, M. K., DeAngelo, J., Bailey, Z. D., Cradock, A. L., Lee, R. M., & Frost, N. (2022). Moving from Policy to Practice for Early Childhood Obesity Prevention: A Nationwide Evaluation of State Implementation Strategies in Childcare. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16). <https://doi.org/10.3390/ijerph191610304>
- Lyons, A. C., & Kass-Hanna, J. (2021). *A multidimensional approach to measuring vulnerability to poverty of Syrian refugees in Lebanon*. The Economic Research Forum (ERF). Working Paper, the University of Illinois at Urbana-Champaign, Dokki, Egypt.
- Macció, J., & Mitchell, A. (2023). Multidimensional Poverty Measurement in Segregated Cities: Evidence from the City of Buenos Aires. *Desarrollo y Sociedad*, 2023(93), 101–137. <https://doi.org/10.13043/DYS.93.3>
- Opaluwa, H. I., Opeyemi, G., Danjuma, S., & Adeyemi, M. (2022). Assessment of multidimensional poverty in Zone A agricultural development project area of Kogi State, Nigeria. *Journal of Agriculture and Food Sciences*, 19(2), 51–62. <https://doi.org/10.4314/jafs.v19i2.6>
- Padmakanthi, N. P. D. (2023). Sustainable Way to Eradicate Poverty through Social Protection: The Case of Sri Lanka. *Social Sciences*, 12(7). <https://doi.org/10.3390/socsci12070384>
- Pattaro, S., Bailey, N., & Dibben, C. (2020). Using Linked Longitudinal Administrative Data to Identify Social Disadvantage. In *Social Indicators Research* (Vol. 147, Issue 3). <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02173-1>
- Pereira, M., & Oliveira, A. M. (2020). Poverty and food insecurity may increase as the threat of COVID-19 spreads. *Public Health Nutrition*, 23(17), 3236–3240. <https://doi.org/10.1017/S1368980020003493>
- Pratama, I. N. (2023a). Dinamika Kemiskinan Di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *SEMINAR*

- NASIONAL LPPM UMMAT, 2, 1216–1222.
- Pratama, I. N. (2023b). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.
- Pratama, M. Y. J., & Zubaidah, S. (2024). Poverty Alleviation Policy Strategy through Sustainability Development Goals (SDGs) and Indonesia's Economic Resources. *KnE Social Sciences*, 2024, 52–65. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i18.16329>
- Ram, K., & Yadav, S. (2021). The Impact of COVID-19 on Poverty Estimates in India: A Study Across Caste, Class and Religion. *Contemporary Voice of Dalit*. <https://doi.org/10.1177/2455328X211051432>
- Ramberg, J., & Watkins, A. (2020). Exploring inclusive education across Europe: some insights from the European Agency Statistics on Inclusive Education. *FIRE: Forum for International Research in Education*, 6(1), 85–101. <https://doi.org/10.32865/fire202061172>
- Rayanakorn, A., Leong, S. L., Chaiprom, P., & Lee, S. W. H. (2022). Cost-effectiveness of Public Health Strategies on COVID-19 Control: A Systematic Review. *Progress in Microbes and Molecular Biology*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.36877/pmmab.0000268>
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Robinson, M., Callinan, S., & Taylor, N. (2023). Disentangling the messiness of natural experiments to evaluate public policy. *Addiction*, 118(9), 1618–1620. <https://doi.org/10.1111/add.16265>
- Saddique, R., Zeng, W., Zhao, P., & Awan, A. (2023). Understanding multidimensional poverty in pakistan: implications for regional and demographic-specific policies. *Environmental Science and Pollution Research, Sharma 2019*. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-28026-6>
- Saunders, M. J., & Evans, C. A. (2020). COVID-19, tuberculosis and poverty: preventing a perfect storm. *The European Respiratory Journal*, 56(1), 2001348.
- Selepe, M. M. (2023). The evaluation of public policy implementation failures and possible solutions. *EUREKA: Social and Humanities*, 1, 43–53. <https://doi.org/10.21303/2504-5571.2023.002736>
- Sujito, A., & Ghofur, M. (2023). The Nurturing Food Sovereignty from the Peripheral Side: the Village Law and the Soul of Agriculture in Rural Development in Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 10(3), 305–316. <https://doi.org/10.22500/10202243672>
- Tan, S. Y., De Foo, C., Verma, M., Hanvoravongchai, P., Cheh, P. L. J., Pholpark, A., Marthias, T., Hafidz, F., Putri, L. P., & Mahendradhata, Y. (2023). Mitigating the impacts of the COVID-19 pandemic on vulnerable populations: Lessons for improving health and social equity. *Social*

- Science & Medicine, 328, 116007.*
- Valensi, G. (2020). COVID-19 and Global Poverty: Are LDCs Being Left Behind? *European Journal of Development Research, 32*(5), 1535–1557. <https://doi.org/10.1057/s41287-020-00314-8>
- Valero-Elizondo, J., Javed, Z., Khera, R., Tano, M. E., Dudum, R., Acquah, I., Hyder, A. A., Andrieni, J., Sharma, G., Blaha, M. J., Virani, S. S., Blankstein, R., Cainzos-Achirica, M., & Nasir, K. (2022). Unfavorable social determinants of health are associated with higher burden of financial toxicity among patients with atherosclerotic cardiovascular disease in the US: findings from the National Health Interview Survey. *Archives of Public Health, 80*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s13690-022-00987-z>
- White, B., Graham, C., & Savitri, L. (2023). Agrarian movements and rural populism in Indonesia. *Journal of Agrarian Change, 23*(1), 68–84. <https://doi.org/10.1111/joac.12506>
- Yang, D., Luan, W., Yang, J., Xue, B., Zhang, X., Wang, H., & Pian, F. (2022). The contribution of data-driven poverty alleviation funds in achieving mid-21st-Century multidimensional poverty alleviation planning. *Humanities and Social Sciences Communications, 9*(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01180-x>
- Zulkifli, F., & Abidin, R. Z. (2023). The Multi-Dimensional Nature of Poverty: A Review of Contemporary Research. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 12*(2), 272–288. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v12-i2/17260>